APLIKASI PENGADUAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI BONE BOLANGO PADA SATGAS PPA

Alimuddin Yasin¹, Fajar Hermawanto², Nasyrah Abdurahman³

^{1,2,3}Prodi Teknik Informatika, Politeknik Gorontalo

Jl. Muchlis Rahim, Desa Panggulo, Kec. Botupingge, Bone Bolango, Gorontalo

ABSTRAK

Minimnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme pengaduan menjadi faktor penyebab tingginya jumlah tindak kekerasan di Kabupaten Bone Bolango. Kasus kekerasan perempuan dan anak tidak ditindaklanjuti karena proses pengaduannya yang sulit untuk dijangkau oleh masyarakat bahkan banyak korban yang enggan melakukan pengaduan karena merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat khususnya perempuan dan anak dalam melakukan pengaduan serta memaksimalkan peran Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, desain dan perancangan serta implementasi aplikasi. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan pengaduan ke Satgas PPA Kabupaten Bone Bolango, Serta dapat memproses pengaduan yang dibuat oleh masyarakat, dan dapat mengelolah data user. Melalui Aplikasi ini tindak kekerasan pada perempuan dan anak dapat berkurang.

Kata Kunci: Aplikasi, Pengaduan, Perempuan, Anak, Satgas.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan hal yang sampai saat ini masih menjadi isu terpenting baik di negara maju maupun berkembang termasuk di Indonesia. Negara Indonesia yang dibentuk dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengertian melindungi dalam Alinea ke-4 termasuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan Setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 uu No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Dwi.S., dkk, 2012).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tindak kekerasan yaitu :

- a. Bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia,kekerasan
- b. Bahwa Perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal. (R. Octaviani Dalango, 2016)

Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapatkan perhatian baik itu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Beberapa daerah di Indonesia telah terbentuk lembaga layanan pengaduan yang menangani permasalahan perempuan dan anak seperti organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota namun pada umumnya penanganan kasus tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi sehingga layanan tidak sesuai dengan kebutuhan. Organisasi perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah kurang cepat dan tanggap dalam merespon kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah, berbagai kendala yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat akan keberadaan lembaga layanan pengaduan tersebut serta bagaimana tugas dan fungsinya.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) ditingkat pusat atas keputusan Menteri dan untuk tingkat provinsi dibentuk atas keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Satgas PPA merupakan wujud pemerintah dalam memberikan perlindungan dan Pemenuhan hak bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan sejenisnya, serta merespon permasalahan perempuan dan anak, Satgas PPA dapat membantu bagian pengaduan masyarakat.

Sejak awal sampai dengan saat ini masyarakat yang ingin memberikan informasi atau ingin melakukan pengaduan yang terjadi di kehidupan atau di lingkungan mereka harus mendatangi tempat yang menangani masalah tersebut, Ironisnya cara yang diterapkan ini sangat tidak efektif karena harus menghabiskan waktu untuk mendatangi tempat penanganan,dan kemungkinan tempat tersebut tidak memberikan kenyamanan untuk masyarakat dalam melakukan pengaduan.

Pelayanan pengaduan ke satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak di Bone Bolango proses pengaduannya masih dilakukan seperti biasa yaitu Pelapor atau korban yang mengalami tindak kekerasan harus datang sendiri ke tempat Pelayanan Pengaduan atau dapat mengirimkan laporan via layanan pesan singkat (SMS) ke Anggota Satgas. Hal ini yang menjadi keterbatasan dalam penanganan kasus permasalahan perempuan dan anak yang pada umumnya masyarakat atau perempuan dan anak ingin melakukan pengaduan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, kekhawatiran persepsi negatife masyrakat kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai tempat layanan pengaduan menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengaduan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas mengenai pengaduan masalah bagi perempuan dan anak maka penulis mengangkat topik penelitian untuk memudahkan perempuan dan anak dalam melakukan pengaduan pada satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak di bone bolango yang berjudul "Aplikasi Pengaduan bagi Perempuan dan Anak di Bone Bolango pada Satgas PPA" Penelitian ini dapat membantu masyarakat khususnya perempuan dan anak di bone bolango untuk melakukan pengaduan terhadap permasalahan yang mereka alami dan dapat mengurangi masalah perempuan dan anak di bone bolango.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lainlain) yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain

2.2 Code Igniter

Digunakan sebagai framework guna memudahkan penulis untuk membuat web application dengan cepat sebab CI sudah di lengkapi oleh berbagai fungsi serta bersifat open source.

2.3 Java

Tujuan pembuatan bahasa pemrograman java adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa pemrograman C yang sebelumnya telah ada sehingga aplikasi-aplikasi (program komputer) yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman tersebut mampu berjalan diatas berbagai platform perangkat keras dan perangkat lunak (Sistem operasi) yang berbeda.

2.4 Database

Database digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data tanpa duplikasi sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat. Database merupakan sekumpulan data atau informasi yang disampaikan didalam komputer secara sistematik. Pada penelitian ini database digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data pada aplikasi.

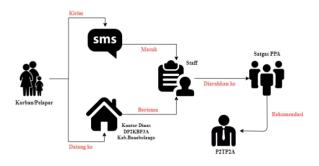
2.5 UML (Unified Modelling Language)

UML dapat diartikan sebagai notasi grafis yang didukung oleh meta model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. UML memiliki beberapa diagram yang mampu membantu pengembang mengkonsumsikan sistem yang dibuat, diagram-diagram tersebut antara lain adalah, use case, activity, class dan sequence diagram.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Analisis Sistem

3.1.1 Analisis Sistem yang sedang berjalan



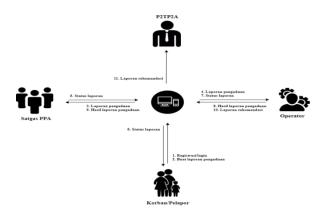
Gambar 1. Sistem yang sedang berjalan

Gambar 1. menunjukan proses dari sistem yang sedang berjalan yang ada di Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak di Bone Bolango. Pengaduan ke Satgas PPA di Bone Bolango Prosesnya diawali dengan 2 cara yaitu cara pertama korban atau pelapor mendatangi langsung kantor Dinas DP2KBP3A Kemudian korban atau pelapor akan dipertemukan dengan anggota satgas yang ada di kantor Dinas untuk menyampaikan pengaduan. cara kedua dengan menyampaikan pengaduan melalui pesan singkat yaitu sms ke anggota satgas. Setelah itu anggota Satgas akan mencatat, mengidentifikasi, serta menganalisis aduan. Aduan tersebut akan disampaikan ke anggota satgas lainya khususnya anggota satgas yang berada di satu kecamatan yang sama dengan korban dan menjadi

pendamping bagi korban. Kemudian anggota satgas yang menjadi pendamping akan melakukan penjangkauan, pemantauan kasus serta melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan, melindungi korban di lokasi kejadian dari hal yang membahayakan, serta pendamping dari satgas ini akan menempatkan atau mengungsikan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Anggota satgas akan memberikan rujukan atau rekomendasi kepada P2TP2A untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

3.2 Perancangan Sistem

3.2.1 Sistem yang diusulkan

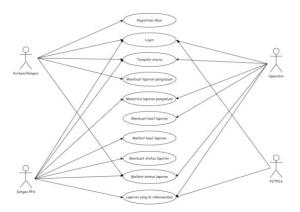


Gambar 2. Sistem yang diusulkan

Gambar 2. Menunjukan skenario alur kerja sistem yang diusulkan, diawali dengan korban/pelapor melakukan registrasi akun yang akan diverifikasi dan divalidasi oleh sistem. Setelah itu korban atau pelapor melakukan login pada aplikasi, jika berhasil login akan diarahkan ke halaman utama untuk membuat laporan pengaduan, laporan pengaduan yang dibuat oleh korban/pelapor akan masuk ke-anggota satgas dan operator, anggota satgas akan membuat status laporan di setiap tindakan penanganan yang dilakukan dan dapat dilihat oleh korban/pelapor serta operator. Operator membuat hasil laporan pengaduan yang dapat dilihat oleh seluruh anggota satgas, dan membuat laporan yang akan direkomendasikan ke P2TP2A, laporan rekomendasi tersebut akan dilihat oleh P2TP2A.

3.2.2 Perancangan Sistem (UML)

A. Use Case Diagram

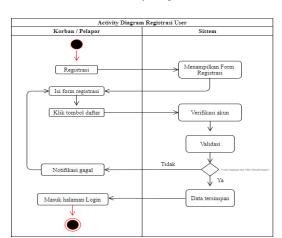


Gambar 3. Use case diagram

Gambar 3 menunjukan Use case diagram, pertama aktor korban/pelapor berperan sebagai perempuan atau anak yang mengalami permasalahan. pada saat aplikasi dijalankan aktor melakukan registrasi terlebih dahulu setelah itu melakukan login dan akan diarahkan ketampilan utama, ditampilan utama aktor ini akan melakukan

pengaduan,pengaduan akan disimpan dan dikirim ke-Satgas dan operator. korban/pelapor akan mendapatkan perubahan status pada laporan yang dikirimkan. Aktor Satgas, Operator, dan P2TP2A melakukan login pada saat menjalankan aplikasi dan akan diarahkan ketampilan utama, ditampilan utama satgas menerima laporan pengaduan,dapat membuat status pada laporan pengaduan, dan dapat melihat hasil laporan serta laporan yang direkomendasi. Aktor operator juga dapat melihat laporan dan dapat membuat hasil laporan serta laporan rekomendasi. Aktor P2TP2A hanya dapat melihat laporan yang direkomendasi.

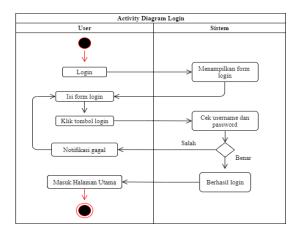
B. Activity Diagram Registrasi Korban



Tabel 1. Activity Registrasi user

Tabel 1 Menunjukan activity diagram registrasi user. yaitu saat menjalankan aplikasi akan di tampilkan halam registrasi dan user akan menginput data diri setelah itu akan diverifikasi dan akan divalidkan oleh sistem jika sudah valid maka user akan melakukan login.

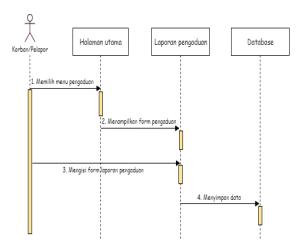
C. Activiy Diagram Login



Tabel 2. Activity diagram login

Tabel 2 Menunjukan activity diagram login oleh Korban/pelapor, Satgas, operator, dan P2TP2A. aktor akan mengisi form login yaitu mengisi username dan password yang telah dibuat oleh korban/pelapor saat melakukan registrasi dan untuk satgas serta P2TP2A username dan password yang dibuat oleh operator. setelah itu akan dicek oleh sistem apakah username dan password sudah benar atau tidak jika sudah maka akan diarahkan ketampilan utama.

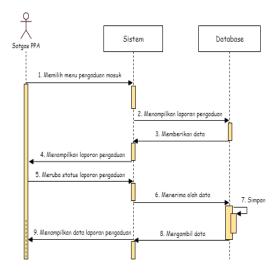
D. Sequence Diagram Korban/Pelapor



Gambar 4. Sequence diagram korban/pelapor

Gambar 4 Menggambarkan Sequnce diagram korban/pelapor yaitu saat dihalaman utama korban atau pelapor memilih menu pengaduan setelah itu akan ditampilkan form pengaduan yang harus diisi lengkap agar proses penanganan kasusnya dipercepat, selesai mengisi form pengaduan maka data yang ada di form itu akan masuk atau tersimpan ke database.

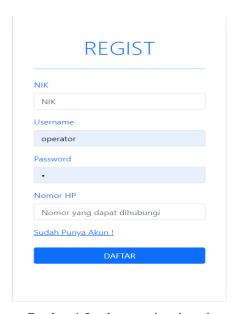
E. Sequence Diagram Satgas



Gambar 5. Sequence diagram satgas

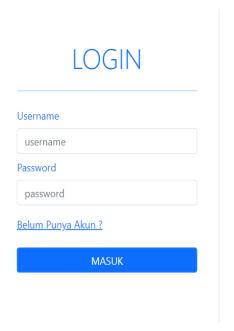
Gambar 5 Menunjukan Sequence diagram satgas, laporan pengaduan yang telah dikirim oleh korban/pelapor akan dilihat oleh satgas dengan memilih menu pengaduan masuk, dan data pengaduan akan diambil dari database kemudian akan ditampilkan di laporan pengaduan dan akan dilihat oleh satgas, setelah itu satgas akan merubah status dari laporan pengaduan sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan dan status tersebut akan diterima atau disimpan ke database dan dapat dilihat oleh semua anggota satgas serta korban/pelapor

4. IMPLEMENTASI



Gambar 6. Implementasi registrasi

Gambar 6 merupakan tampilan implementasi registrasi yang dilakukan oleh user atau masyarakat pada aplikasi pengaduan. Pada tampilan ini user dapat memasukan NIK yang sesuai pada KTP, membuat username dan password serta memasukan No Hp dan setelah itu dapat menekan tombol daftar.



Gambar 7. Implementasi login

Gambar 7 merupakan tampilan implementasi login, pada tampilan ini user, anggota, operator dan P2TP2A dapat melakukan login dengan memasukan username dan password. Username memasukan username dan password yang telah dibuat saat melakukan registrasi dan anggota serta satga dan P2TP2A dapat memasukan username dan password yang telah dibuat oleh admin atau operator.





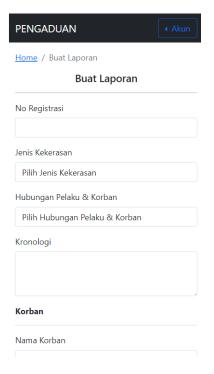
Gambar 8. Implementasi halaman utama

Gamabar 8 merupakan tampilan implementasi halam utama user atau masyrakat, pada tampilan ini user dapat melakukan pengaduan dengan menekan tombol tambah pada bagian bawah ditampilan dan dapat melihat profil dengan menekan tombol akun yang berada dibagian atas pada tampilan.



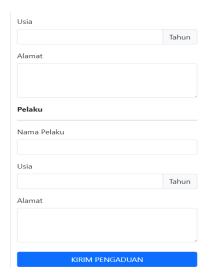
Gambar 9. Implementasi profile user

Gambar 9 Merupakan tampilan Implementasi profile user, pada tampilan ini user dapat melihat identitas diri yang sesuai dengan KTP ataupun Kartu Keluarga.



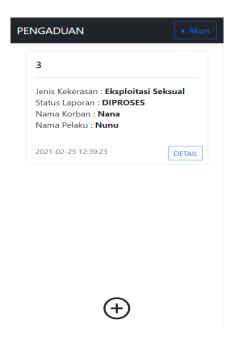
Gambar 10. Implementasi laporan

Gambar 10 merupakan tampilan Implementasi pembuatan laporan pengaduan yang dilakukan oleh user atau masyarakat, pada tampilan ini user dapat mengisi form pengaduan seperti no regis, jenis kekerasan, dan lain-lain sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.



Gambar 11. Implementasi laporan 2

Gambar 11 merupakan tampilan ke 2 dari Implementasi laporan pengaduan yang dilakukan oleh user. Setelah user mengisi semua form pengaduan user dapat menekan tombol kirim pengaduan yang ada di bagian bawah.



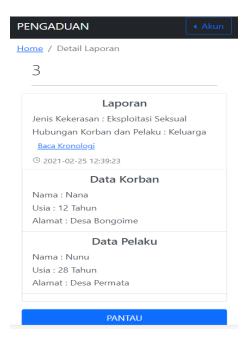
Gambar 12. Implementasi laporan user

Gambar 12 merupakan tampilan implementasi laporan yang telah dibuat oleh user pada tampilan ini user dapat melihat detail dari pengaduan yang telah dia buat.



Gambar 13. Implementasi satgas

Gambar 13 merupakan tampilan implementasi dari satgas, tampilan ini adalah tampilan halam utama untuk satgas, disini satgas langsung dapat melihat laporan pengaduan yang masuk dan pada tampilan ini satgas dapat melihat detail dari pengaduan.



Gambar 14. Implementasi detail laporan

Gambar 14 merupakan tampilan implementasi detail laporan untuk satgas, pada tampilan ini satgas dalam menekan tombol pantau jika anggota satgas siap melakukan pemantaun dari kasus yang dilaporkan.



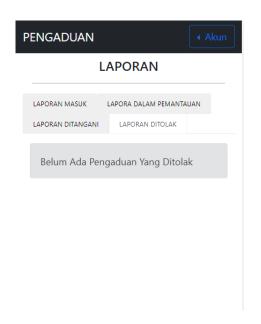
Gambar 15. Implementasi Pemantauan

Gambar 15 merupakan tampilan implementasi hasil pemantaun, pada tampilan ini satgas dapat memberikan hasil pemantauan kasus dengan menekan tombol tolak jika kasus ditolak dan tangani jika kasus akan diberikan penanganan.



Gambar 16. Implementasi laporan ditangani

Gambar 16 merupakan tampilan Implementasi laporan yang ditangani oleh anggota satgas. Dan anggota dapat melihat detail laporan dengan menekan tombol detail.



Gambar 17. Implementasi laporan ditolak

Gambar 17 merupakan tampilan implementasi laporan ditolak oleh anggota satgas.



Gambar 18. Implementasi Laporan Operator

Gambar 18 merupakan tampilan implementasi laporan untuk operator, disini operator dapat menambahkan informasi yang kurang pada laporan pengaduan.



Gambar 19. Implementasi Data Anggota

Gambar 19 merupakan Implementasi data anggota untuk operator, pada tampilan ini operator dapat menambah data anggota satgas.



Gambar 20. Implementasi data warga

Gambar 20 merupakan tampilan implementasi data warga untuk operator, pada tampilan ini operator dapat menambah data warga sesuai dengan ktp atau kartu keluarga.

DATA PENGADUAN								
#	No Registrasi	Jenis Kekerasan	Nama Korban	Usia Korban	Hubungan	Nama Pelaku	Usia Pelaku	Kronologi
1	1	Pelecehan Seksual	Ane	17	Keluarga	Ente	27	Blalala
2	2	Eksploitasi Seksual	Lia	20	Teman	Amat	22	Dipukul kuat

Gambar 21. Data Pengaduan

Gambar 21 merupakan implementasi data pengaduan untuk P2TP2A, pada tampilan ini bagian pencatatan P2TP2A dapat melihat laporan pengaduan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan Implementasi aplikasi yang dilakukan pada Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kabupaten Bone Bolango, serta hasil uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa

- 1. Adanya aplikasi pengaduan ini dapat mempermudah serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak dalam melakukan pengaduan.
- 2. Dapat memaksimalkan peran Anggota Satgas PPA untuk masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak di Bone Bolango.

PUSTAKA

- A. Y. Pratama et al., "Aplikasi Pengaduan Masyarakat Untuk melaporkan kejadian pungutan liar di Kabupaten Kudus Berbasis Android", *Jurnal SIMETRIS*, vol. 8, no. 2, pp. 399–404, 2017.
- Dwi.S, Tri Wahyuni, Dikdik B.Arif, "Hak Azasi Manusia", Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- E. Maulana et al., "Rancang Bangun Aplikasi Mobile Kelurahan Rangkepan Jaya Berbasis Android Design And Development Of Mobile Application For Community Compliance In Rangkepan Jaya District", *Prosiding Seminar Nasional Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 4, No. 3, pp. 192–201, 2020.
- F. Masya and F. M. Simanjuntak, "Sistem pelayanan pengaduan masyarakat pada divisi humas Polri Berbasis Web", *SNATI*, pp. 15–16, 2012.
- I. Satria, A. Hadi, and D. Kurniadi, "Aplikasi Pengaduan Masyarakat Kota Padang Berbasis Android", *Jurnal Vote Teknika*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- R. Octaviani Dalango, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Kota Gorontalo" Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Hukum, pp. 1–24, 2016.
- S. Putri, A. Alkadri, R. Wahid, and S. Insani, "Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada DPPPA", *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*, Vol. 5, No. 3, pp. 329–337, 2019.